

PEMILIHAN JENIS DAN POLA TANAM, SOLUSI PENANGANAN KEGAGALAN PEMBANGUNAN TANAMAN PADA KAWASAN DENGAN TEKANAN SOSIAL TINGGI

K eberhasilan pembangunan tanaman di wilayah Perum Perhutani tidak serta merta tercapai sebagai akibat dari pengelolaan lahan yang tepat dan pemanfaatan bibit unggul, namun juga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk (terutama di pulau Jawa) dan dinamika masyarakat dewasa ini yang menjadikan penanganan pembangunan tanaman kehutanan menjadi semakin kompleks. Di satu sisi ketergantungan terhadap tenaga kerja masyarakat sekitar hutan masih sangat dibutuhkan oleh Perum Perhutani, akan tetapi, interaksi masyarakat yang sangat besar di wilayah hutan menjadi "problematika" tersendiri dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan tanaman.

Mengingat kekayaan keragaman karakteristik wilayah untuk kesesuaian tanaman dan masyarakat di Perhutani, keberhasilan pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan menjadi sangat kompleks dan membutuhkan penanganan khusus, yang secara teknis menyesuaikan perencanaan hutan yang sudah disusun oleh Perhutani, namun secara sosial "*ada tuntutan*" lain untuk tetap mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar hutan terhadap lahan garapan. Secara prinsip Perhutani sebagai salah satu BUMN di awal penunjukannya mempunyai dua mandat dalam pengelolaan hutan secara lestari, yakni aspek ekonomi (pendapatan perusahaan) dan aspek sosial (dalam hal ini masyarakat desa pangkuan), yang harus berjalan selaras sehingga keberadaan hutan memberi manfaat terhadap

pemerintah dan terlebih masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu bentuk kebijakan program yang dikeluarkan oleh Perhutani untuk mendukung keberhasilan pengelolaan hutan. Program ini bukan berarti tanpa kendala dan serta merta dapat diterapkan di seluruh lokasi Perum Perhutani yang di setiap wilayah pangkuannya memiliki masyarakat yang heterogen baik secara ekonomi, adat istiadat, budaya, dan potensi wilayah serta SDM-nya. Bahkan di beberapa wilayah program PHBM perlu adanya "modifikasi khusus" yang menuntut keberanian dari pejabat Perhutani setempat untuk membuat "rasa yang berbeda" terhadap penerapan PHBM, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip pengelolaan hutan agar tetap lestari dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk "modifikasi khusus" yang dalam beberapa tahun terakhir ini mulai dirasakan dampaknya oleh perusahaan maupun masyarakat adalah "bentuk pola kerja sama pengelolaan hutan tanaman Kayu Putih di kelas perusahaan Jati" yang berlokasi di wilayah Divisi Regional Jawa Timur, KPH Mojokerto, BKPH Bluluk, RPH Sukorame dengan LMDH Wonosuko di Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Keberanian inovasi pimpinan Perhutani setempat menanam Kayu Putih pada kelas perusahaan Jati berawal dari ketidak berhasilan pembangunan tanaman Jati selama 2 – 3 dekade terakhir. Pada prinsipnya pola kerjasama yang terjalin antara LMDH Wonosuko di wilayah kerja

Perum Perhutani RPH Sukorame telah menyentuh banyak aspek yang terkandung dalam sistem agroforestry, dimana telah tercipta iklim ketergantungan satu sama lain dalam pemanfaatan lahan hutan, keberhasilan tanaman Kayu Putih di satu sisi dan tanaman tumpangsari di sisi lainnya.

Hal ini terbukti dengan hasil penilaian tanaman yang dikerjasamakan dengan LMDH Wonosuko, persen tumbuh tanaman Kayu Putih mencapai 97% di tahun 2018 dengan model plong-plongan (12 m X 12 m) dan konvensional (4 m X 1 m) dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan berhasil diimplementasikan di lapangan.



Gambar 1. Pola tanam konvensional, tumpang sari jarak tanam 4m X 1m



Gambar 2. Pola tanam plong-plongan 12m X 12m, jarak tanam 1,5m X 1,5m

Beberapa catatan penting yang dapat diambil dari pengelolaan tanaman Kayu Putih pada lokasi ini adalah terjalinnya kerja sama yang solid antara jajaran Perhutani dengan LMDH setempat (LMDH Wonosuko), dibarengi

dengan keinginan yang sama untuk mewujudkan keberhasilan tanaman dan peningkatan pendapatan masyarakat (khususnya anggota LMDH Wonosuko). Kedisiplinan dalam mentaati kesepakatan pembagian andil pasca penetapan SPK, khususnya kerelaan untuk menata ulang bagian andil yang sudah digarap sebelumnya untuk ditata ulang secara adil melalui sistem "kembali ke awal" atau mereka menyebut dengan "nol-nolan".

Adapun Alur proses bentuk kerjasama (nol-nolan) ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3. Alur pengajuan perjanjian kerjasama pembuatan tanaman Kayu Putih oleh LMDH Wonosuko kepada Perhutani

Melihat dari hasil penilaian tanaman dan proses kerja sama yang sudah ditempuh oleh KPH Mojokerto di atas, penulis merasa perlu untuk berbagi kepada seluruh pembaca yang budiman melalui media ini.

- Hermawan Mustika Adi, Chorirotun Nur Ulifah, Emi Arifatin, Eni Setyaningsih, Hardi Wardoyo, Aris Setiyono, Kelompok Peneliti Kelola Sosial, Agroforestri & Lingkungan, Departemen Riset & Inovasi, Perhutani *Forestry Institute (PeFI)*.